

Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim

Indah Tri Utami, Mohammad Rofiuddin*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga, Indonesia

^{*)} Korespondensi (e-mail: mohammad.rofiudin@iainsalatiga.ac.id)

Abstract

This study aims to determine the effect of the Minimum Wage, Government Expenditure and Regional Original Income on poverty in the province with the largest Muslim majority population in Indonesia. The objects of this research are 10 provinces with the largest Muslim majority population in Indonesia in 2017-2020. The method used to see the effect of using panel data regression is the Fixed Effect Model. The results of this study indicate that simultaneously Minimum Wage, Government Expenditures and Regional Original Income have an effect on poverty in the province with the largest Muslim majority population in Indonesia. The Minimum Wage has no effect on poverty in the province with the largest Muslim majority population in Indonesia, while Government Expenditures and Regional Original Income reduce poverty in the province with the largest Muslim majority population in Indonesia. This research model clarifies the role of Government Expenditures and Regional Original Income in poverty alleviation in the province with the largest Muslim majority population in Indonesia.

Keywords: Poverty, Minimum Wage, Government Expenditure, Local Revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan di provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Indonesia. Objek penelitian ini adalah 10 provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di Indonesia tahun 2017-2020. Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan regresi data panel adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Indonesia ini. Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di Indonesia, sedangkan Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah mengurangi kemiskinan di Provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Indonesia. Model penelitian ini menjelaskan peran Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah dalam pengentasan kemiskinan di provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah

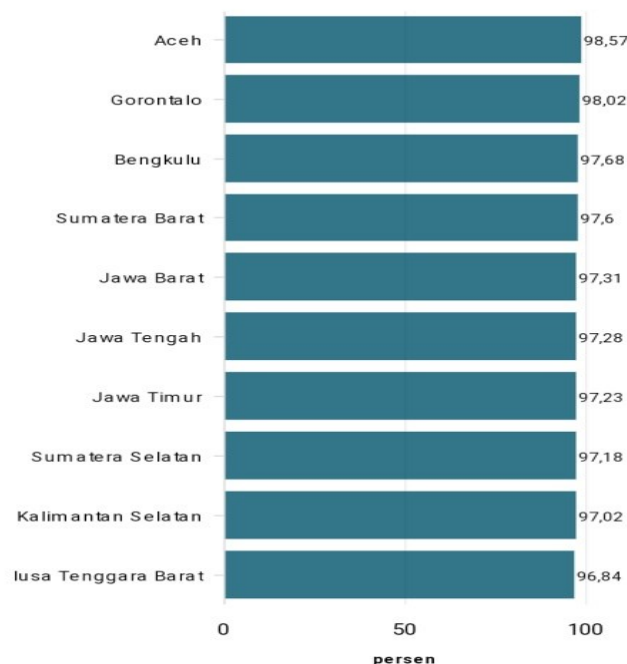
How to cite: Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum, belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3),145-160. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i3.463>

1. Pendahuluan

Masalah yang sering disinggung baik itu di negara maju maupun negara berkembang tepatnya pada permasalahan perekonomian adalah kemiskinan. Salah satunya adalah

Indonesia, dimana masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat digolongkan dalam masalah yang kompleks karena kemiskinan dianggap memberi hambatan pada proses pembangunan suatu ekonomi negara. Pembangunan sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah proses perubahan dengan tujuan untuk mengarah kearah yang lebih maju diantaranya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat adil, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia (Suripto & Subayil, 2020).

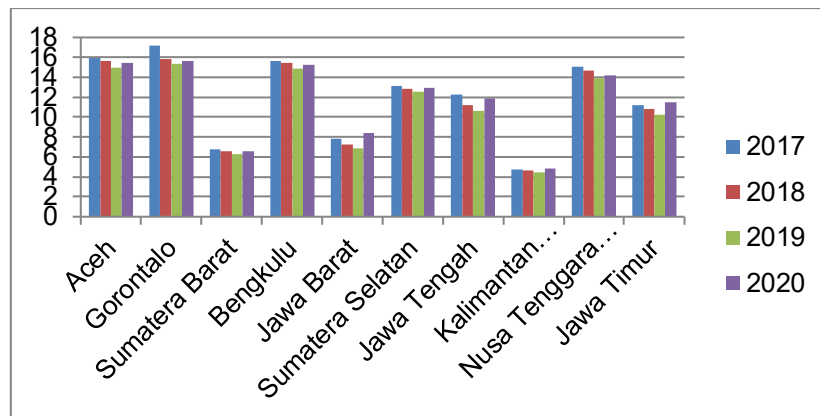
Kemiskinan itu berkembang beriringan dengan keterbatasan dalam mencukupi kehidupannya. Banyak yang berpendapat tentang masalah kemiskinan sehingga mengakibatkan pro dan kontra baik melihat dari penyebab kemiskinan, dampak, cara mengukur serta cara menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Seperti halnya di Indonesia tingkat kemiskinan yang ada masih tinggi serta menjadi topik penting untuk diteliti. Kemiskinan menurut Bank Dunia ditentukan oleh keberhasilan pembangunan ditingkat daerah dan upaya pembangunan yang dapat dilakukan pemerintahan daerah dalam memerangi kemiskinan merupakan bagian dari memajukan pembangunan ekonomi (Nurbismi et al., 2019).



Sumber Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)

Gambar 1. Presentase Penduduk Islam Terbanyak di Indonesia (Ribuk Jiwa)

Gambar 1. dapat disimpulkan jumlah penduduk beragama Islam dari 10 Provinsi tersebut paling sedikit adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 96,84 ribu jiwa. Dan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu di Provinsi Aceh dengan jumlah 98,57 ribu jiwa.



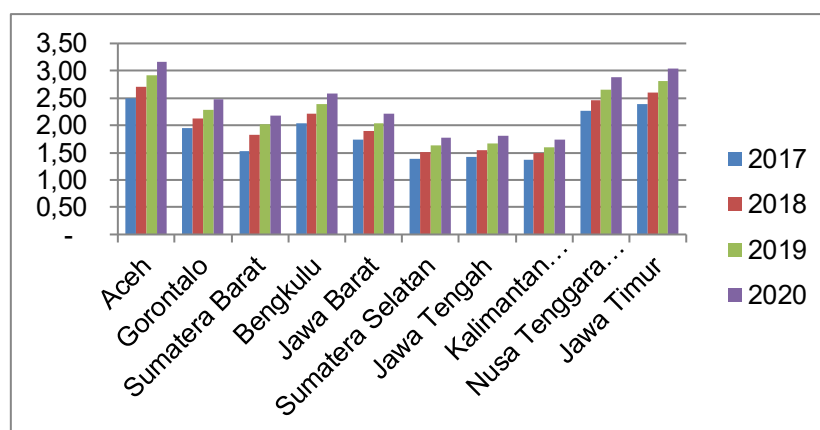
Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin Mayoritas Muslim di Indonesia (Persen)

Gambar 2. dapat disimpulkan bahwa presentase penduduk miskin dari tahun 2017 sampai 2020 rata-rata mengalami penurunan. Adapun presentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Gorontalo dan presentase penduduk miskin yang paling sedikit yaitu di provinsi Kalimantan Selatan.

Kemiskinan di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor diantaranya yaitu Upah Minimum Regional (UMR), Pendidikan, dan Kesehatan. Upah Minimum Regional (UMR) merupakan sebuah perlindungan pemerintah terhadap buruh. Adanya ketentuan upah minimum, dimana pekerja memiliki kekuatan monopoli cenderung untuk melindungi pekerja yang dipekerjakan dalam suatu industri (Putra et al., 2019).

Salah satu tujuan orang mencari pekerjaan dan bekerja di dunia kerja adalah untuk memperoleh penghasilan berupa upah (uang). Masalah upah dan kebutuhan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan hidup yang beragam dan meningkat, sedikit banyak bergantung pada pendapatan dan daya beli masyarakat. Daya beli seseorang seringkali dipengaruhi oleh pendapatan yang diperolehnya selama periode waktu tertentu selama bekerja (Gani, 2015).

Berbagai macam cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan/gaji. Upah minimum provinsi yang ada dan ditetapkan pada proses pembagian upah/gaji pekerja baik Instansi Swasta maupun Instansi Pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Gambar 3 sebagai berikut:

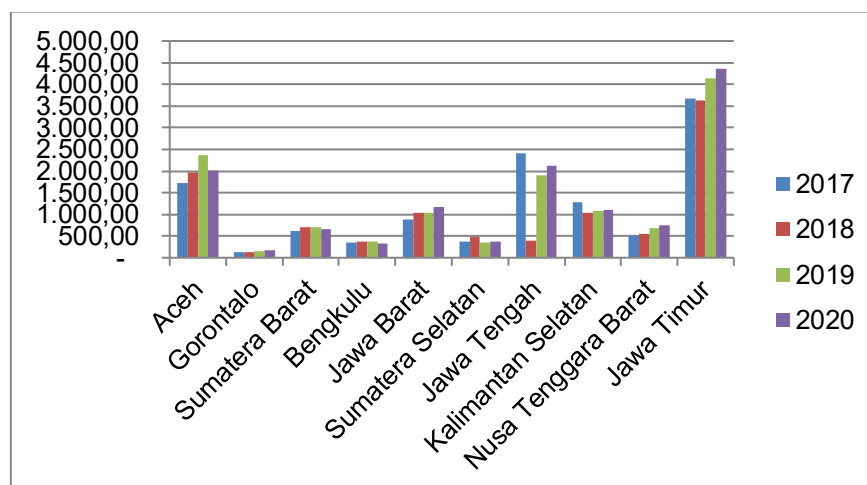


Gambar 3. Upah Minimum 10 Provinsi di Indonesia Mayoritas Muslim (Rupiah)

Gambar 3. menunjukkan tingkat upah minimum pada 10 Provinsi di Indonesia yang mayoritas muslim terbanyak. Upah minimum dari tahun 2017-2020 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menarik minat masyarakat dalam bekerja selain itu juga karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Adapun upah minimum tertinggi yaitu Provinsi Aceh sedangkan upah minimum yang terendah yaitu Provinsi Jawa Tengah.

Kemiskinan menurut Sukirno (2003) dalam (Aprilia, 2016) merupakan masalah yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kesejahteraan. Dimana tingkat kesejahteraan itu sendiri diukur dengan tingkat pendapatan, apabila pendapatan masyarakat telah mencapai pada nilai maksimum maka syarat penggunaan tenaga kerja secara penuh dapat tercapai. Akibat adanya pengangguran maka akan timbul masalah yaitu berkurangnya pendapatan masyarakat, dan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan yang telah tercapai.

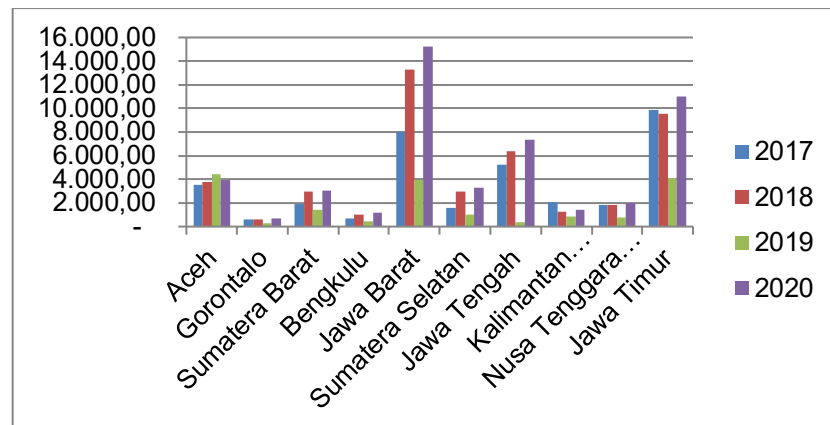
Telah ditunjukkan melalui studi empiris bahwa upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan; studi oleh Islami dan Anis (2019), Ayu (2018), dan Sutikno et al. (2019) semua menemukan bahwa menaikkan upah minimum mengurangi kemiskinan. Upah minimum, menurut (Romi & Umiyati, 2018), berdampak cukup besar terhadap kerawanan ekonomi. Menurut penelitian (Pambudi, 2016), angka kemiskinan cenderung meningkat setiap kali suatu daerah menerapkan upah minimum.



Sumber : Direktorat Federal Perimbangan Keuangan

Gambar 4. Belanja Pemerintah dibidang kesehatan (Miliar Rupiah)

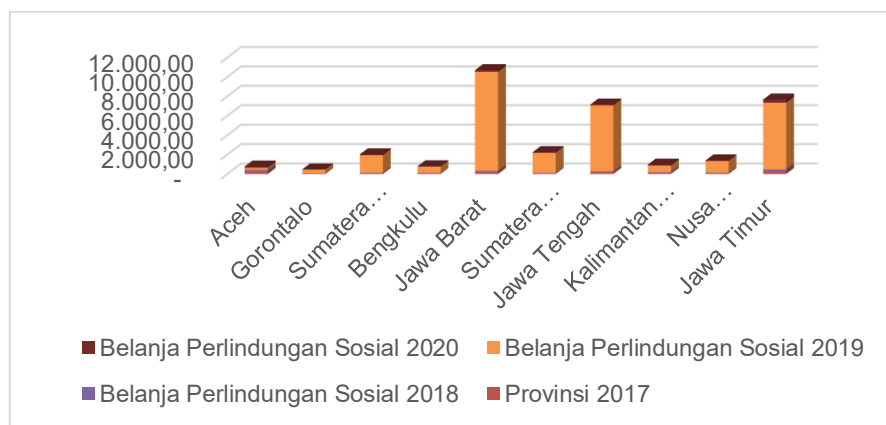
Pada Gambar 4. dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pemerintah dibidang kesehatan secara umum mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Anggaran terbesar dari 10 Provinsi mayoritas muslim paling tinggi yaitu di Provinsi Jawa Timur. Dan belanja pemerintah dibidang kesehatan yang paling rendah yaitu di Provinsi Bengkulu.



Sumber : Direktorat Jedral Perimbangan Keuangan

Gambar 5. Belanja Pemerintah dibidang Pendidikan (Miliar Rupiah)

Gambar 5. dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran dibidang Pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, adapun Provinsi yang anggaran pendidikannya paling tinggi yaitu Provinsi Bengkulu. Dan anggaran pendidikan yang terendah yaitu Provinsi Gorontalo.



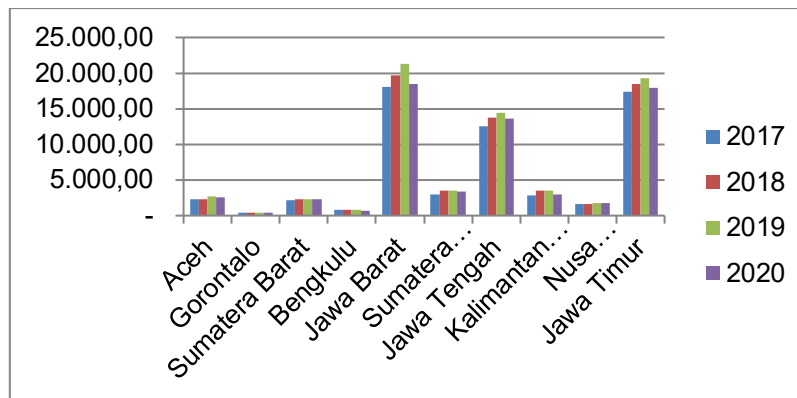
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 6. Belanja Pemerintah dibidang Perlindungan Sosial (Miliar Rupiah)

Gambar 6. dapat dilihat bahwa anggaran dari pemerintah untuk perlindungan sosial dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak stabil ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang mengalami penurunan. Adapun belanja pemerintah yang paling tinggi di bidang perlindungan sosial yaitu terjadi pada tahun 2017. Dan untuk belanja pemerintah yang paling sedikit yaitu pada tahun 2020.

Dari sisi pengeluaran ada dua cara kebijakan publik yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama, penduduk miskin akan terdampak positif dari pengeluaran publik dengan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Kedua, dengan pengeluaran publik masyarakat miskin berkesempatan untuk berkontribusi dalam proses pertumbuhan (Hasanah & Siregar, 2014).

Didalam angka tingkat kemiskinan tidak terlepas dari salah satunya Pendapatan Asli daerah. Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi penerimaan APBN suatu daerah, maka semakin rendah jumlah penduduk miskin di daerah tersebut (Siregar & Ramadhan, 2020).



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gambar 7. Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)

Gambar 7. dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah secara umum mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Akan tetapi, dari tahun 2019 sampai ke tahun 2020 Pendapatan Asli Daerahnya mengalami penurunan. Berbeda dengan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 justru mengalami peningkatan. Untuk Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan yang paling rendah di Provinsi Gorontalo.

Menurut (Al-Khawarizmi et al., 2021) semakin tinggi pendapatan, semakin rendah tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah pendapatan yang melimpah, pemerintah daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk program yang dapat mengurangi kemiskinan, seperti belanja pembangunan yang akan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan, menurut penelitian empiris yang dilakukan oleh (Oktaviani, 2018) dan (Ramadhani, 2020). Sebaliknya, (Fitryanti & Handayani, 2020), (Manek & Badrudin, 2017), dan (Firdaus, 2019) melaporkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan itu masih naik turun dan banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu Upah Minimum, Belanja Pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kemiskinan. Penelitian terkait dengan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, namun begitu penelitian ini hanya fokus pada sisi kebijakan fiskal dengan objek 10 provinsi yang mempunyai jumlah penduduk miskin (muslim) terbanyak, yang sekaligus menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

Lingkaran Kemiskinan

Nurkse mengajukan hipotesis yang menunjukkan dua jebakan kemiskinan yang saling berhubungan, masing-masing dengan lingkaran setannya sendiri. Pertama, dalam hal penawaran, individu kurang memiliki insentif untuk menghemat uang ketika pendapatan mereka sudah rendah karena produktivitas yang buruk. Sebagai konsekuensi langsung, ini akan menyebabkan penurunan pengembangan modal baru,

yang pada gilirannya akan menyebabkan kekurangan modal baru dan penurunan produktivitas yang sesuai. Selain itu, hampir tidak ada insentif untuk berinvestasi di negara berkembang karena permintaan domestik yang lemah. Pendapatan penduduk yang sangat rendah merupakan penyebab kelangkaan banyak barang di pasar. Produktivitas yang rendah adalah akibat dari investasi yang tidak mencukupi di masa lalu dan merupakan penyumbang utama pendapatan daerah yang sedikit. Tidak adanya insentif investasi dan faktor-faktor serupa berkontribusi pada rendahnya tingkat penciptaan modal (Sukirno, 2006).

Upah Minimum dan Kemiskinan

Upah Minimum yaitu standar terendah dan layak yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memberikan upah atau gaji kepada karyawan yang akan diterima setiap bulannya. Adapun penelitian terdahulu yang membuktikan upah minimum mempengaruhi kemiskinan yaitu penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu Sari, (2021) mengemukakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa. Begitu juga dengan Hanifah (2021) mengemukakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Lamongan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Romi & Umiyati (2018) mengemukakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Sehingga H1: Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Belanja Kesehatan dan Kemiskinan

Hubungan belanja kesehatan dan kemiskinan sebagaimana penelitian yang dilakukan Ariwuni & Kartika (2019) mengemukakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Bali, Melati & Burhany (2021) mengemukakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Demak, Masinambow, dan Londa (2020) mengemukakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Manado, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Azhar (2022) mengemukakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Sehingga H2: Belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Belanja Pendidikan dan Kemiskinan

Keterkaitan belanja pendidikan dan kemiskinan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ariwuni & Kartika (2019) mengemukakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Bali, Melati & Burhany (2021) mengemukakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Demak (2020) mengemukakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kota Manado, Hidayat & Azhar (2022) mengemukakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Azmi & Panjawa (2022) yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sehingga H3: Belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Belanja Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Hubungan belanja perlindungan sosial dalam mempengaruhi kemiskinan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Handayani (2019) yang mengatakan bahwa belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Suharto (2015); yang menyebutkan bahwa PKH di Indonesia menunjukkan bahwa program ini memberi kontribusi yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Sihombing, & Muslianti (2022) yang menunjukkan baik secara simultan maupun parsial bahwa Fungsi Perlindungan Sosial, berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan. Sehingga H4: Belanja Perlindungan Sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Adapun penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan diantaranya Manek & Badrudin (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fitriyanti & Handayani (2020) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, begitu juga dengan Firdaus (2019) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Sehingga H5 : Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

3. Metode Penelitian

Semua informasi yang digunakan dalam analisis ini bersifat sekunder, dan dikumpulkan dari situs web dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2017-2020. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan yang berkaitan dengan Upah Minimum, Belanja Pemerintah, Pendapatan asli Daerah serta tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan sampel dalam penelitian ini melihat laporan yang mencakup tahun 2017-2020 dan berfokus pada upah minimum, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan tingkat kemiskinan di 10 provinsi mayoritas Muslim di Indonesia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel. Regresi data menggunakan dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Adapun bentuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$K = \beta_0 + \beta_1 \log UM_{it} + \beta_2 \log BP_{it} + \beta_3 \log PAD_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

- K : Kemiskinan,
- UM : Upah minimum,
- BP : Belanja Pemerintah
- PAD : Pendapatan Asli Daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

Uji Stasioneritas

Stasioneritas diuji menggunakan uji root dan uji root-levin populer (Lin, Chu, dan lainnya) (LLC). Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,005, maka data dalam penelitian ini dianggap stasioner; jika tidak, mereka dianggap tidak stasioner. Hasil uji stasioneritas untuk setiap variabel dirinci di bawah ini.

Tabel 1. hasil Uji Stasioneritas

Variable	Probability Unit Root Test	Keterangan
Kemiskinan	0.0000	Uji stasioneritas root level
UMK	0.0000	Uji stasioneritas root level
Kesehatan	0.0000	Uji stasioneritas root level
Pendidikan	0.0000	Uji stasioneritas root level
Sosial	0.0000	Uji stasioneritas root level
PAD	0.0000	Uji stasioneritas root level

Tabel 1. menampilkan hasil pengolahan yang menunjukkan nilai prob lebih kecil dari 0,05. Semua variabel dalam penelitian ini lolos uji stasioneritas sesuai dengan yang diharapkan.

Estimasi Data: Menggunakan Fixed Effect Model

Pada penelitian ini, konstanta untuk masing-masing individu akan berbedawalaupun koefisien (slope) pada variabel independen akan tetap (Bawono dan Arya, 2018). Adapun hasil menggunakan *Fixed Effect* Model sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.7692	6.347306	5.95043	0.0000
UMK	-0.56807	0.358764	-1.58342	0.1259
Kesehatan	0.370789	0.078902	4.699364	0.0001
Pendidikan	0.366956	0.077003	4.765474	0.0001
Sosial	0.022693	0.03994	0.568179	0.5750
PAD	-3.85705	0.774027	-4.98309	0.0000
R-squared	0.998172	Durbin-Watson stat		1.979425
Adjusted R-squared	0.997148			
F-statistic	975.1254			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan output pada Tabel 2 dapat dilihat hasil probabilitas (F-Statistic) adalah 0.000000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 0.05. artinya, model ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas jarque-bera adalah 0.681264 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi (α) 0.05, maka H_0 diterima keputusannya bahwa data residual pada model regresi berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normality

Jarque-Bera	0.76761
Probability	0.68126

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai kolerasi dari masing-masing variabel bebas < 0.10 maka H_0 diterima, keputusannya bahwa tidak ada multikolinieritas anatar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	Umk	Kesehatan	Pendidikan	Sosial	PAD
UMK	1.000000	0.215407	0.106730	0.100478	-0.14839
Kesehatan	0.215407	1.000000	0.651340	0.423936	0.755354
Pendidikan	0.106730	0.651340	1.000000	-0.027281	0.760479
Sosial	0.100478	0.423936	-0.02728	1.000000	0.459120
PAD	-0.148393	0.755354	0.760479	0.459120	1.000000

Dalam penelitian ini, kami menghitung R^2 dengan melakukan regresi antara variabel dependen kami menggunakan (*Klein Rule of Thumb*), dan kemudian kami membandingkan nilai tersebut dengan R^2 dari persamaan utama kami (Bawono, 2006).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	R-squared	R-squared utama	Kesimpulan
R-squared UMK	0.812919	0.875280	Tidak ada multikolinieritas
R-squared Kesehatan	0.913751	0.942500	Tidak ada multikolinieritas
R-squared Pendidikan	0.823910	0.882607	Tidak ada multikolinieritas
R-squared Sosial	0.489270	0.659514	Tidak ada multikolinieritas
R-squared PAD	0.994964	0.996643	Tidak ada multikolinieritas
R-squared Kemiskinan	0.992933	0.995470	Tidak ada multikolinieritas

Analisis tersebut diketahui bahwasanya hasil R-squared anatar independent variable tidak melampaui R-squared adjusted dari bentuk regresi utama, artinya tidak terdeteksi adanya masalah multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.380012	0.266711	1.424807	0.1633
UMK	0.048996	0.184566	0.265466	0.7923
Kesehatan	0.001378	0.058137	0.023696	0.9812
Pendidikan	0.000859	0.077471	0.011093	0.9912
Sosial	-0.015354	0.036757	-0.417709	0.6788
PAD	-0.019356	0.079622	-0.243094	0.8094

Tabel 6. dapat dilihat bahwa, nilai probabilitas masing-masing variabel bebas lebih besar dibandingkan taraf signifikansi (α) 0.05, maka H_0 diterima, keputusannya bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa, nilai dW 1.979425, dU 1.7859 dan dL 1.2305. Nilai Dw berada di antara -2 dan +2 ($-2 < dw < +2$) maka tidak terjadi autokolerasi.

Uji Kebaikan Model

Pada Tabel 2. nilai R-squared sebesar 0.998172 dapat disimpulkan bahwa kontribusi UMK, kesehatan, pendidikan, sosial dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap variasi perubahan naik turunnya tingkat kemiskinan adalah sebesar 0.998172% sisanya 99,001828% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai Prob (F-statistic) 975.1254, sedangkan nilai F tabel statistik F berdasarkan kriteria (α) 0.05, df_1 (total variabel - 1) = 5-1= 4 dan df_2 (n-k-1) = 40-5-1= 34, diperoleh nilai F Tabel sebesar 0.174449 atau =FINV(5%,4,34). Nilai F hitung 975.1254. lebih besar dibandingkan F tabel 0.174449 berdasarkan kriteria keputusan uji F, maka H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.

Uji Validitas Pengaruh (Uji T)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui hasil uji t yaitu:

1. Variabel UMK memiliki nilai Probabilitas $0.1259 > 0.05$. maka dapat diartikan bahwa UMK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama (H_1) yang mengatakan bahwa Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
2. Variabel Kesehatan memiliki nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$ menjelaskan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Maka hipotesis kedua (H_2) yang mengatakan belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ditolak.
3. Variabel Pendidikan memiliki nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$ menjelaskan bahwa belanja pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Maka hipotesis ketiga (H_3) yang mengatakan belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ditolak.
4. Variabel Sosial memiliki nilai probabilitas $0.5750 > 0.05$ menjelaskan bahwa belanja perlindungan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Maka hipotesis keempat (H_4) yang mengatakan belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ditolak.
5. Nilai probabilitas untuk variabel PAD adalah $0.000 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, diterima hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan substansial terhadap kemiskinan.

4.2. Pembahasan

Upah Minimum dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian ini, upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Sari (2021) yang mengatakan bahwa Upah minimum mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2021), Romi & Umiyati (2018), Kurniawati & Gunawan (2017) dan Panjahitan (2020). Hal ini dijelaskan bahwa adanya ketentuan nilai upah minimum jumlahnya harus di atas kebutuhan hidup layak masyarakat. Artinya bahwa adanya kenaikan

upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah penduduk.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori Nurkse, dimana Nurkse menjelaskan bahwa ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah yang disebabkan oleh produktivitas rendah maka akan menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Secara teori, semakin tinggi upah minimum semakin berpengaruh pula terhadap penurunan angka kemiskinan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori tersebut, karena pada kenyataannya upah minimum tidak efektif untuk menurunkan angka kemiskinan pada Provinsi mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Secara empiris hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Sutikno et al. (2019), Pambudi (2016), Ayu (2018) serta penelitian dari Islami & Anis (2019) yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Realitanya upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada Provinsi mayoritas muslim terbanyak di Indonesia yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kemungkinan tidak semua masyarakat mempunyai pendapatan sesuai upah minimum yang telah ditetapkan di daerahnya, standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan dan kebutuhan hidup layak kurang sesuai nominalnya sehingga masyarakat masih merasa kurang dalam mencukupi kebutuhannya. Melihat dengan kondisi ini perlu ada evaluasi dari pemerintah terhadap upah minimum dimana upah minimum bisa disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan hidup sehingga nantinya masyarakat dapat menerima upah yang sesuai.

Belanja Pemerintah dan Kemiskinan

Belanja Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil sesuai dengan penelitian Kinanthi (2018), Azmi & Panjawa (2022) dan Pusparani (2022) yang menyatakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya semakin banyak belanja kesehatan naik maka dapat menyebabkan kemiskinan meningkat. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu dari Ariwuni & Kartika (2019), Melati & Burhany (2021), Hidayat & Azhar (2022) dan Demak, Masinambow, & Londa (2020) yang mengemukakan bahwa belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pada prinsipnya, investasi di fasilitas kesehatan dapat meningkatkan perekonomian. Tingkat kemiskinan saat ini akan menurun secara proporsional dengan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi Deviana et al. (2018). Semakin besar ketersediaan peralatan medis yang lengkap, semakin sedikit beban finansial yang ditanggung masyarakat untuk menyediakan layanan perawatan kesehatan, yang pada gilirannya dapat memberikan efek perbaikan pada tingkat kemiskinan.

Belanja Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian sesuai Kinanthi (2018) yang

menyatakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya semakin banyak belanja pendidikan naik maka menyebabkan kemiskinan meningkat. Sehingga variabel belanja kesehatan belum mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Namun begitu hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu dari Ariwuni & Kartika (2019), Melati & Burhany (2021), Azmi & Panjawa (2022) dan Demak, Masinambow, & Londa (2020), yang mengemukakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya semakin banyak belanja pendidikan maka akan menurunkan angka kemiskinan.

Secara teori, Dengan mendapatkan pendidikan yang layak maka suatu negara akan memiliki SDM yang berkualitas. Pendidikan memiliki peran yang krusial untuk suatu bangsa dan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia (Melati & Burhany 2021). Dimana pendidikan merupakan investasi dimasa depan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi. Penelitian ini sejalan dengan teori tersebut dimana pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Itu artinya pengeluaran belanja pendidikan yang tinggi mampu menjadikan SDM yang bermutu sehingga ketika manusia telah mempunyai bekal ilmu yang cukup bisa bekerja dengan layak dan mendapatkan upah yang tinggi dan tentunya terhindar dari kemiskinan.

Belanja Perlindungan Sosial

BPS mengatakan perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Merujuk pada teori tersebut, hasil penelitian ini mengatakan bahwa perlindungan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Itu artinya, segala bentuk kebijakan dari pemerintah belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada Provinsi mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Diharapkan dengan adanya peran perlindungan sosial dapat meningkatkan status dan membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termajinalkan (Vijayanti & Ocktilia, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel belanja perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil sesuai dengan penelitian Putri & Muhammad (2021), Riva et al. (2021), dan Ayu (2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarti (2022), dan Syamsuri & Bandiyono (2018) yang mengemukakan bahwa belanja perlindungan sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang artinya belanja perlindungan sosial belum efektif untuk menurunkan angka kemiskinan pada Provinsi mayoritas muslim terbanyak di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan

Variabel PAD mengurangi kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian sebelumnya. Karena pendapatan daerah telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan dalam studi sebelumnya Ramadhani (2020), Oktaviani (2018) temuan kami memberikan lebih banyak bukti bahwa pendapatan daerah sangat

membantu dalam mengurangi kemiskinan di sebagian besar wilayah mayoritas muslim di Indonesia. Namun begitu emuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Manek & Badrudin (2017), Fitryanti & Handayani (2020), dan Firdaus (2019), yang semuanya menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pada prinsipnya, anggaran yang lebih besar, terutama dalam penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat, dimungkinkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar Kawulur et al. (2019). Temuan penelitian ini sejalan dengan gagasan bahwa Pendapatan Asli Daerah membantu pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik PAD dikelola, semakin efektif pengentasan kemiskinan melalui otonomi pembangunan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian terhadap faktor keimiskinan pada Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di Indonesia tahun 2017-2020 menggunakan regresi data panel dapat disimpulkan sebagai berikut: variabel Upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Variabel Belanja pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Sedangkan belanja perlindungan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di Indonesia. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada Provinsi dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Peneliti juga mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi membantu terselesaikannya penelitian ini

Referensi

- Al-Khawarizmi, M. A., Marseto, & Sishadayati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21.
- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2018). *Jurnal Ilmiah*.
- Ayu, D. S. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015)*. Universitas Islam Indonesia.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A., & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di

- Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Firdaus, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9, 79–90. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3323/>
- Gani, E.S. (2015). Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. *Jurnal Tahkim*, 9(2), 128.
- Hasanah, H., & Siregar, H. (2014). Pengaruh belanja pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia: Analisis ekonometrika panel data tingkat provinsi. *Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVII*, 255–264.
- Kasim, R., Engka, D. S. M., Siwu, H. D., Inflasi, A. P., Dan, P., Pemerintah, B., Kasim, R., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Kasim, R., Engka, D. S. M., & Siwu, H. D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 953–963.
- Kinanthi, R. (2018). Pengaruh pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1, 249–259.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Melati, A. M., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 422-430.
- Nurbismi, N., Maulida, Z., Ridha, A., & Astuti, I. N. (2019). Peranan Kinerja Amil Mengelola Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 156–167. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i02.1322>
- Prayoga, A. M. B. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003-2018*. Universitas Islam Indonesia.
- Pusparani, A. D. (2022). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Subsidi Dengan Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7.
- Putra, I., Mahesa, P. N., & Yasa, I. N. M. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Nusa Tenggara. *E-Jurnal EP Unud*, 9, 1804–1832.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10.

- Rambe, R. A., & Purmini, P. (2020). Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i1.10996>
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10.
- Sihombing, P. R., & Muslianti, D. (2022). Apakah Dana Desa dan Fungsi Belanja APBD Mampu Mengatasi Kemiskinan di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 2(2), 236-243.
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 1-13.
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21-27.
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal Of Islamic Economic and Banking*, 1, 28–43. <https://doi.org/10.25217/srikandiv1i1.1335>
- Suripto, & Subayil, L. (2020). 35-Article Text-93-1-10-20200425. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127.
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 88–98.
- Syamsuri TN, M. R., & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha*, 2.
- Vijayanti, D., & Ocktilia, H. (2019). Perlindungan Sosisal Bagi Keluarga Miskin Peserta Program Keluarga Harapn Di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 2.